

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Selayar disusun untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) lima tahun pertama (2006-2010). RPJMD adalah jabaran lebih lanjut dari RPJM/Renstra Provinsi Sulawesi Selatan dan visi misi Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Langsung masa bakti 2006 – 2010 dan merupakan deskripsi dari apa yang akan menjadi sasaran prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar dalam lima tahun ke depan. RPJMD disusun dan ditetapkan untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah diraih sebelumnya sehingga berfungsi menjembatani apa yang telah dan akan dibangun oleh Pemerintah Daerah sekarang dan ke depan.

Sejak genderang reformasi pemerintahan di Indonesia mulai ditabuh pada awal tahun 1998, menjadi momentum penting dan berharga bagi pemerintah dan masyarakat Selayar untuk mulai melancarkan pembangunan di segala lini kehidupan masyarakat. Hak otonomi luas yang diperoleh lewat kebijakan otonomi daerah, menjadi potensi dan motivasi kuat bagi pemerintah dan masyarakat di wilayah ini untuk menyikapi berbagai persoalan pemerintahan dan pembangunan yang dihadapi.

Kewenangan pemerintahan yang luas dalam dukungan sumber daya perimbangan keuangan pusat dan daerah (DAU dan DAK) yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah ternyata cukup merangsang percepatan laju perubahan dan pertumbuhan daerah. Dari hasil – hasil merealisasikan program – program pembangunan selama era implementasi otonomi daerah, selama berlakunya UU No.22 Tahun 1999, maupun setelah berlakunya UU penggantinya, yakni UU No.32 Tahun 2004, menggeser paradigma pemerintahan dan pembangunan masyarakat untuk lebih banyak terlibat dalam memprakarsai, melaksanakan dan mengevaluasi pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat

Selayar telah menyadari sedalam – dalamnya bahwa dengan pemberian ruang seluas – luasnya kepada pemerintah daerah dan masyarakat Selayar untuk membangun dirinya sendiri, adalah sebuah kekuatan dan peluang untuk merajut masa depan yang lebih baik.

Selama tahun 2000 – 2005 yang dikenal sebagai era awal perjalanan otonomi daerah menurut UU No. 22/ 1999, telah banyak mendorong kemajuan dan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Selayar. Dari keberhasilan itu cenderung semakin menyadarkan pemerintah dan masyarakat untuk memahami substansi permasalahan klasik daerah yang dihadapi sebelum, selama dan masa depan otonomi daerah. Faktor letak dan kondisi geografis daerah yang terdiri dari pulau – pulau lebih luas laut daripada daratan, terpisah dari daratan Sulawesi Selatan, disadari sebagai karakteristik daerah yang selama ini dianggap mewariskan kompleksitas masalah dalam multi dimensi. Kondisi wilayah seperti itu, menuntut ketersediaan infrastruktur, utamanya sarana dan fasilitas perhubungan darat, laut dan udara yang memadai dalam kawalan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, professional dan berkompentensi tinggi pula. Dalam pada itu, pemerintah dan masyarakat Selayar yang belajar dari hasil – hasil pembangunan selama ini, ternyata kemudian menyadari bahwa sasaran pembangunan yang selama ini hanya fokus ke wilayah daratan (kontinental), belum berhasil mengangkat derajat perekonomian daerah. Keterbatasan lahan dan kualitas pengolahan yang belum efektif sebagai akibat lanjut dari sarana dan fasilitas yang belum memadai, serta sumber daya manusia (SDM) yang relatif masih terbatas kemampuan dan keterampilannya, cenderung menuntut dukungan sumber potensi baru dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang begitu lambat.

Sadar akan keadaan yang demikian itu, sejak tahun 2003 yang lalu, pemerintah dan masyarakat Selayar telah mendeklarasikan komitmennya untuk menjadi Kabupaten Maritim. Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) telah dituangkan visi bersama yang berbunyi: **“Terwujudnya Selayar Sebagai Kabupaten Maritim Yang Mapan Mandiri dan Berkelanjutan”**. Visi ini dijabarkan ke dalam 4 misi pokok yakni:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum
2. mewujudkan Selayar sebagai Kabupaten Maritim dalam satu kesatuan yang utuh
3. Memosisikan selayar sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, baik darat , laut, maupun udara
4. mendorong transformasi budaya masyarakat agraris/kontinen ke bahari yang religius.

Melalui visi bersama tersebut, pemerintah dan masyarakat Selayar ke depan menyakini akan mampu membangun sebuah kekuatan ekonomi baru yang mengandalkan sumber potensi kemaritiman dengan tetap memperhatikan hubungan dan saling keterkaitan dengan potensi darat kontinental. Selain itu pemerintah dan masyarakat Selayar bertekad untuk mengakses Selayar dari keterisolasiannya selama ini dengan memanfaatkan peluang ketersediaan dan keikutsertaan Selayar dalam sistem transportasi nasional, utamanya dalam hubungan wilayah barat dan timur Indonesia melalui Selayar. Dalam mewujudkan sistem ekonomi yang tangguh seperti itu, terlebih dahulu perlu terbangun sistem pemerintahan yang baik (good governance) dalam proses transformasi budaya dari budaya kontinental ke budaya maritim. Visi Pemerintah dan masyarakat Selayar inilah yang kemudian dijabarkan menjadi sub-Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada Langsung yang akan menjadi muatan pokok dari LPJMD Selayar dalam kurun waktu 2006 – 2010 ke depan.

1.2. Maksud dan tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Selayar tahun 2006-2010, adalah dimaksudkan untuk menggambarkan bentuk, arah dan sasaran pembangunan yang jelas yang hendak dituju oleh Pemerintah Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun yang menjadi tujuan utama penyusunan RPJMD ini, adalah untuk menjadi pedoman kerja Pemerintah Daerah dan jajarannya di dalam merumuskan dan menentukan program dan kegiatan tahunan.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Selayar, didasarkan pada landasan hukum :

1. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
2. Pasal 14 ayat (2) undang – undang No.25 tahun 2004, yang berbunyi, "Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi-misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah". Kewajiban kepala daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri NO.050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah yang antara lain menyatakan bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

1.4. Hubungan RPJM Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

RPJMD Kab. Selayar merupakan penjabaran dari RPJPD Kab. Selayar dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun, selanjutnya dijadikan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan setiap tahun.

RPJMD juga akan menjadi pedoman perumusan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD). Renstra SKPD selanjutnya akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD yang bermuarah pada penyusunan RAPBD.

1.5. Sistematika Penulisan.

RPJMD ini disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Gambaran Umum Kondisi daerah
- Bab III Visi dan Misi
- Bab IV Strategi Pembangunan Daerah
- Bab V Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- Bab VI Arah Kebijakan Umum
- Bab VII Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII Penutup dan Lampiran.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografis

Secara Geografis, Selayar terletak antara 5°42' – 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' – 122°30' Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba di Sebelah Utara, Laut Flores Sebelah Timur, Laut Flores dan Selat Makassar Sebelah Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Sebelah Selatan.

Wilayah Kepulauan Selayar terdiri atas 123 Pulau Besar dan Pulau Kecil. Gugusan Kepulauan tersebut sebagian dihuni penduduk, sebagian lagi adalah pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau berpenghuni tersebut antara lain Pulau Pasi Tanete, Pulau Pasi Gusung, Malibu, Guang, Bahuluang, Tambolongang, Polassi, Jampea, Lambego, Bonerate, Pasi Tallu, Kakabia, Jinato, Kayuadi, Rajuni, Rajuni Bakka, Rajuni Ki'di, Kalaotoa, Latondu, dan lain-lain.

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Selayar adalah 22.326,19 km² dimana luas daratan 1.188,28 km². Secara administratif pemerintah Kabupaten Selayar terbagi menjadi 10 Kecamatan, 66 desa dan 7 kelurahan. Sebanyak 5 Kecamatan berada di Kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukotanya Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukotanya Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur ibukotanya Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate ibukotanya Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena ibukotanya Latokdok.

Adapun 5 kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng ibukotanya Benteng, Kecamatan Bontoharu ibukotanya Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu ibukotanya Pariangan, Kecamatan Bontomanai ibukotanya Polebunging dan Kecamatan Bontomatene ibukotanya Batangmata.

Berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Benteng, jumlah rata-rata hari hujan sekitar 10 hari dengan curah hujan 150 mm, sedangkan berdasarkan Stasiun Meteorologi Bontomatene hari hujan rata-rata 8 hari dengan curah hujan

sekitar 147 mm, dan berdasarkan Stasiun Meteorologi Bontosikuyu rata-rata hari hujan sekitar 13 hari dengan curah hujan sekitar 214 mm

Kondisi topografi Kabupaten Selayar bervariasi, sebagian tanah datar dan ada yang agak miring dengan tipe iklim wilayah ini termasuk type B dan C. Musim hujan pada bulan November hingga Juni dengan curah hujan mencapai lebih 200 mm sedangkan musim kemarau pada bulan Agustus sampai September.

2.2. Perekonomian Daerah

Secara nasional pembangunan ekonomi yang telah ditempuh di masa lalu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun sekaligus mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Penitikberatan pembangunan masa lalu hanya kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan kualitas manusia secara rata-rata.

Meskipun demikian pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada peningkatan produksi nasional, tidak disertai oleh pembangunan dan penguatan institusi-institusi baik publik maupun institusi pasar terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem represi dan tertutupan telah melumpuhkan berbagai institusi strategis seperti sistem hukum dan peradilan yang dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan serta sistem politik untuk terciptanya mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and balances*), demikian pula sistem sosial yang diperlukan untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan damai. Hasil pembangunan yang dicapai justru menimbulkan akibat negatif dalam bentuk kesenjangan antar golongan pendapatan, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat. Sementara itu erosi dan kelumpuhan berbagai sistem dan lembaga strategis di atas telah menghasilkan kondisi yang rapuh serta sangat rawan terhadap guncangan baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional akibat arus globalisasi.

Krisis ekonomi tahun 1997/1998 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, sosial dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, handal dan berkelanjutan. Meskipun demikian, transformasi dan reformasi yang telah menghasilkan berbagai perubahan tersebut masih belum mencapai hasil yang memuaskan. Bahkan berbagai langkah transformasi dan reformasi awal telah menghasilkan berbagai implikasi rumit yang harus dan terus menuntut pemecahan masalah yang lebih sistematis dan konsisten.

Permasalahan pembangunan pada tingkat nasional sebagaimana diuraikan di atas berimplikasi pula terhadap permasalahan pembangunan daerah. Sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Selayar dengan mengandalkan perikanan, kelautan dan kepariwisataan serta sektor pertanian sebagai potensi unggulan daerah, maka permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menentukan agenda, sasaran serta program pembangunan sebagai berikut :

Pertama, masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar. Pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai **4,45 %** dan tingkat pendapatan perkapita penduduk sebesar Rp. **3.593.809**. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2003 struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor pertanian dengan distribusi sebesar **47,14 %** disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar **14,56 %**, sektor jasa-jasa lainnya sebesar **13,07 %**, angkutan dan komunikasi sebesar **10,31 %**. Sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih didominasi oleh komoditi tanaman perkebunan sebesar **20,96 %**, sedangkan sektor perikanan yang merupakan potensi andalan daerah hanya menyumbang **17,29 %**.

Masih rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia,

terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya modal usaha yang dimiliki oleh para pengusaha dibidang perikanan. Disamping itu lemahnya penegakan hukum dan minimnya kerjasama antar daerah dan provinsi yang saling menguatkan mendorong terjadinya penurunan produksi dari waktu ke waktu jika penangkapan secara ilegal terus berlanjut.

Sektor pariwisata yang tergabung dalam lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi yang relatif masih rendah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebesar **14,56%**. Hal ini antara lain disebabkan oleh faktor pendukung yang sangat minim seperti perhotelan, restoran, dan usaha-usaha lainnya. Disamping itu masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pada Obyek dan Daerah Tujuan Wisata (ODTW), termasuk masih terbatasnya aksesibilitas untuk menjangkau lokasi obyek wisata tersebut juga merupakan permasalahan tersendiri yang memerlukan pemecahan di masa datang.

Pada sektor pertanian dihadapkan pada permasalahan rendahnya tingkat produksi. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut ; rendahnya mutu bibit tanaman, masih terbatasnya prasarana irigasi, masih rendahnya tingkat keterampilan petani, dan masih kurangnya pemamfaatan teknologi pertanian.

Kedua, Kualitas sumberdaya manusia, baik sumberdaya manusia aparatur, swasta, maupun masyarakat masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk kabupaten Selayar. Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2003 ditemukan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SD atau lebih rendah (tidak pernah sekolah) masih mencapai **73,11 %** dari total penduduk atau **80.571** jiwa, **23,27 %** atau **25.644** jiwa berpendidikan sekolah lanjutan, dan hanya **3,63 %** atau **4.000** jiwa berpendidikan tinggi.

Tingkat kesehatan masyarakat relatif masih rendah, yang dapat dilihat dari usia harapan hidup masyarakat mencapai 66,6 tahun, angka kematian bayi pada tahun 2004 mencapai **8,8 %** per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu yang berhubungan dengan persalinan masih relatif tinggi bahkan lebih tinggi dari target

nasional yakni mencapai **281** per 100.000 kelahiran hidup, masih tingginya proporsi balita kurang gizi, terjadinya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah dan antar tingkat pendapatan masyarakat, kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, belum tersedianya sarana dan prasarana kesehatan serta kurangnya dan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan.

Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Selayar tahun 2003 mencapai 64,0 yang diakumulasi dari Indeks Kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) 66,6 tahun, Indeks Pendidikan 71,2 yang merupakan gabungan dari Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, dan Indeks Paritas Daya Beli sebesar Rp.583.000.- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Selayar tersebut masih berada di bawah IPM Nasional yang mencapai 69,2 pada tahun 2002.

Ketiga, dukungan infrastruktur terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat belum memadai. Penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, perumahan, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Pembangunan infrastruktur yang representatif dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana dalam jumlah yang memadai. Pada sebagian infrastruktur, Pemerintah Daerah masih bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan dan pemeliharannya, misalnya pembangunan jalan, jaringan irigasi, pelabuhan, bandar udara, dan jaringan air bersih.

Permasalahan lain berkaitan dengan penyediaan infrastruktur adalah kesenjangan antar wilayah daratan dengan wilayah kepulauan. Wilayah daratan pulau Selayar relatif mendapat perhatian lebih besar pada masa lalu sehingga ketersediaan infrastrukturnya lebih lengkap. Sementara pada wilayah kepulauan masih memiliki infrastruktur dalam jumlah sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam

upaya mengatasi kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah daratan dan kepulauan, maka pengalokasian kegiatan dibidang ini 5 (lima) tahun ke depan lebih diarahkan kewilayah kepulauan.

Keempat, belum menguatnya pelembagaan politik lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, serta lemahnya penegakan hukum. Secara umum disadari dan diakui bahwa lembaga-lembaga pemerintahan daerah mulai tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa/kelurahan belum mampu mengidentifikasi, menampung dan menyalurkan keseluruhan aspirasi yang merupakan kebutuhan masyarakat dan akan diakomodir dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal yang sama terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tidak memiliki kemampuan memadai dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Permasalahan lemahnya kemampuan kelembagaan masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi politik rakyat terkait dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya, serta belum terciptanya iklim politik yang akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Terkait dengan itu, masih lemahnya penegakan hukum secara adil terhadap semua strata sosial masyarakat masih merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

Kelima, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup belum lestari. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan pemamfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak dan mengutamakan aspek eksploitasi tanpa mempertimbangkan bahkan mengabaikan fungsi konservasi.

Pengrusakan lingkungan hidup yang dihadapi selama ini dan berindikasi akan berlanjut dimasa datang adalah penebangan hutan secara liar terutama di area Daerah Aliran Sungai (DAS), pemboman dan pembiusan terhadap sumberdaya hayati laut (ikan dan lobster) dan penambangan galian golongan C

pada sungai-sungai secara tidak terkendali. Dengan demikian perhatian terhadap aspek kelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Keenam, kualitas pelayanan umum kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Daerah dirasakan masih rendah. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan umum ini antara lain adalah masih tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah; rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur; rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai; masih kurangnya perangkat aturan yang mengatur secara jelas tentang pelayanan kepada masyarakat; masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan; serta belum memadainya prasarana dan sarana aparatur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; serta masih lemahnya tingkat koordinasi antar lembaga pemerintah baik secara horizontal diantara lembaga pemerintah daerah maupun vertikal antara pemerintah kabupaten dengan tingkat pemerintah provinsi dan pusat. Oleh sebab itu peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi perhatian besar 5 (lima) taun ke depan.

2.3. Sosial Budaya Daerah

2.3.1 Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sektor inilah yang paling bertanggungjawab terhadap lahirnya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas di suatu negara. Sektor ini pula yang akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial dimasa depan karena sumberdaya manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan pembangunan.

Sampai pada tahun 2004 di Kabupaten Selayar tercatat jumlah Taman Kanak-kanak (STK) sebanyak 15 buah, Sekolah Dasar (SD) 139 buah dengan jumlah guru 946 orang dan murid 13.725 orang. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 23 buah dengan jumlah guru 387 orang dan murid 3.352 orang. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 6 buah dengan

jumlah guru 138 orang dan jumlah murid 1.597 orang. Disamping itu terdapat pula Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar di Benteng.

Meskipun demikian ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan sumberdaya tenaga pendidikan (guru) di Kabupaten Selayar belum dapat dikatakan menggembirakan. Hal tersebut ditandai dengan sejumlah masalah krusial yang mengemuka : (a) pemerataan pendidikan (b) kualitas pendidikan dan (c) sarana, prasarana dan manajemen sistem pendidikan.

Problem pemerataan pendidikan dapat dilihat dari aspek geografis dan tingkat ekonomi masyarakat. Dari aspek geografis misalnya, masih terdapat "kesenjangan" yang cukup besar antara masyarakat di perkotaan dan di pedesaan khususnya di pulau-pulau kecil dalam hal kesempatan memperoleh pendidikan. Kesenjangan itu kian diperlebar segera setelah melihat perbedaan tingkat pendapatan masyarakat juga sangat mencolok di dua kawasan tersebut. Akibatnya tidak sedikit anak usia wajib belajar yang mengalami putus sekolah secara dini karena keadaan ekonomi keluarga yang mencekik.

Disini tampak jelas bahwa kondisi ekonomi keluarga memiliki korelasi kuat dengan partisipasi pendidikan masyarakat. Faktor ekonomi keluarga merupakan penyebab yang paling menonjol dari rendahnya partisipasi pendidikan masyarakat. Khususnya ditingkat SLTA, banyak diantara lulusan SLTP lebih memilih bekerja yang riil dan jasa dibandingkan melanjutkan pendidikan ke SLTA. Selain dari masalah ekonomi, daya tampung sekolah tingkat SLTA juga masih menghambat rendahnya partisipasi pendidikan masyarakat khususnya di pulau-pulau sehingga sebagian dari mereka terpaksa tidak dapat melanjutkan sekolah.

Pembangunan dibidang pendidikan bertujuan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di setiap jenjang, juga bertujuan meningkatkan mutu sumberdaya manusia. Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi keniscayaan. Namun sejauh ini mutu dan pelayanan pendidikan masyarakat belum menunjukkan hasil yang menggembirakan baik menyangkut penyediaan tenaga guru berkualitas,

perluasan daya tampung maupun pemerataan hingga ke pelosok-pelosok desa maupun pulau-pulau kecil.

Rendahnya mutu pendidikan secara umum disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal terutama diwaliki oleh efektifitas proses belajar mengajar. Rendahnya efektifitas belajar mengajar disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya jumlah dan rendahnya mutu guru, kelemahan metode mengajar dan penguasaan kurikulum yang berbasis kompetensi serta lemahnya sistem dan manajemen persekolahan. Disisi eksternal faktor yang sangat berperan bagi peningkatan mutu pendidikan sangat terkait dengan respon dan pola pikir orang tua dan masyarakat dalam memandang masa depan. Sementara dilihat dari komponen-komponen yang berpengaruh langsung dari mutu pendidikan secara berturut-turut adalah guru yang merupakan komponen utama disusul oleh komponen kelembagaan, sarana dan prasarana, kurikulum berbasis kompetensi dan dukungan sepenuhnya dari orang tua dan masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi fisik bangunan sekolah-sekolah yang ada menunjukkan kondisi dari sedang hingga buruk. Mengingat sekolah merupakan unit pelaksana pendidikan formal yang terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam pula, maka sekolah harus dikelola secara dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Karena itu, pengembangan sistem pendidikan dan keterampilan dimasa datang harus secara spesifik merupakan respon terhadap kepentingan dan kebutuhan sebgaiian besar masyarakat lapisan bawah. Keberpihakan terhadap golongan masyarakat bawah yang umumnya tercekik kemiskinan itu diperlukan untuk mengembangkan msyarakat bawah tersebut menjadi potensi penggerak perekonomian di masa mendatang. Dengan begitu, visi "pelayanan" dan "subsidi silang" guna menyentuh masyarakat bawah mesti menjadi satu cara pandang alternatif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, keterlibatan sektor swasta dan sikap proaktif masyarakat sangat diharapkan dalam menopang gagasan tersebut.

Sehubungan dengan itu telah dirumuskan program pembangunan pendidikan dasar dan menengah untuk 5 tahun ke depan (2006-2010) yang mencakup program pendidikan menengah dan kejuruan, SDLB, pembinaan guru dan tenaga kependidikan, buku peralatan pendidikan lainnya, pendidikan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dan produktivitas pendidikan.

2.3.2 Pelayanan Kesehatan

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari dua aspek : ketersediaan sarana kesehatan dan sumber daya manusia. Kabupaten Selayar memiliki fasilitas kesehatan yang dapat dikatakan relatif memadai, sampai pada tahun 2004 telah memiliki 1 rumah sakit, 11 puskesmas, 43 puskesmas pembantu 182 posyandu, 96 posyandu purnama dan selebihnya adalah posyandu biasa 86 buah.

Sementara menyangkut sumberdaya manusia dibidang kesehatan telah tersedia dokter umum sebanyak 13 orang, dokter gigi sebanyak 3 orang, perawat 86 orang, bidan 38 orang dan pembantu perawat sebanyak 57 orang.

Dalam pelaksanaan keluarga berencana (KB), pasangan usia subur (PUS) sebanyak 1.656 dengan jumlah akseptor baru secara keseluruhan mencapai 1.147 yang terdiri dari 42 orang memakai IUD, 375 orang memakai PIL, dan 538 orang memakai suntikan, kondom 22 orang dan implant 93 orang.

Beberapa permasalahan dan isu strategis yang harus dihadapi dalam pembangunan kesehatan antara lain :

- a. Sebagian masalah kesehatan terkait dengan sektor lain, sehingga usaha pemecahan masalah harus melibatkan sektor terkait. Tantangan utama adalah upaya meningkatkan kerjasama lintas sektoral yang lebih berdaya guna dan berhasil guna mengingat selama ini kurang berhasil.
- b. Mutu sumberdaya manusia kesehatan sangat menentukan keberhasilan upaya manajemen kesehatan. Dalam kaitan dengan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Dengan demikian

tantangan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan sumberdaya manusia kesehatan.

- c. Secara fisik, persebaran sarana kesehatan baik Puskesmas maupun Pustru serta sarana kesehatan lainnya belum dapat dikatakan merata ke seluruh wilayah, ditambah lagi kenyataan bahwa persebaran fisik tersebut masih belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan dan keterjangkauan oleh sebagian besar lapisan masyarakat kepulauan. Dengan demikian tantangan pembangunan kesehatan adalah upaya meningkatkan mutu pelayanan di samping persebaran sarana fisik ke seluruh lapisan masyarakat.

Masalah pembangunan kesehatan juga erat dengan aspek sosial budaya, misalnya perilaku lokal atau lazim dikenal sebagai "*cultural bound public health*", yakni masalah kesehatan berkaitan erat dengan perilaku kultural. Karena itu setiap daerah memiliki masalah kesehatan yang khas dan tipikal. Kabupaten Selayar misalnya, yang memiliki karakteristik daerah khas gugus kepulauan memperlihatkan kondisi geografis yang demikian rupa sehingga untuk program tertentu bidang kesehatan tidak mampu menjangkau pulau-pulau kecil yang letaknya jauh dari ibukota Benteng. Dalam konteks ini diperlukan pendekatan sosial pasial dalam pembangunan kesehatan. Sebab, paradigma pemerintah tidak semata mencari "keuntungan" dari jasa yang diberikan kepada masyarakat, tetapi yang terpenting adalah prinsip pelayanan optimal. Dari perpektif inilah seharusnya dikembangkan visi pembangunan yang lebih luas dan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sementara masyarakat diharapkan lebih bersifat proaktif untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan, mencegah terjadinya resiko penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam gerakan peningkatan kesehatan masyarakat. Karena itu dalam penyelenggaraan program kesehatan masyarakat dimasa mendatang diperlukan peningkatan peran swasta dalam sebuah pola kemitraan yang saling menguntungkan.

2.3.3 Indeks Pembangunan Kesehatan

Tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten Selayar hingga tahun 2004 masih sangat memprihatinkan. Jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 (KS1) masih cukup tinggi yaitu keluarga prasejahtera berjumlah 3540 dan keluarga sejahtera 1 berjumlah 11.109. Mereka tersebar di 10 kecamatan. Keluarga prasejahtera terdapat di Kecamatan Pasimarannu sebanyak 319, Kecamatan Takabonerate 284, kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 356, Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 183, Kecamatan Benteng 202, Kecamatan Bontomanai sebanyak 312 dan Kecamatan Bontometene 347. keluarga sejahtera terdapat di Kecamatan Pasimarannu sebanyak 528, Kecamatan Passillambena sebanyak 506, Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 535, Kecamatan Takabonerate sebanyak 822, Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 976, Kecamatan Bontoharu sebanyak 1221, Kecamatan Benteng 1551, Kecamatan Bontomanai sebanyak 2066 dan Kecamatan Bontometene 2330.

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Selayar belum memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal itu merupakan salah satu indikator bahwa upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu yang relatif panjang dan kerja keras dari berbagai pihak. Dengan kerja keras yang didukung perencanaan yang matang bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat Kabupaten Selayar dapat terlepas dari keterbelakangan dalam aspek pembangunan kualitas manusia.

2.3.4 Distribusi Pelayanan Dasar dan Tingkat Kemudahan Akses Penduduk Terhadap Pelayanan Sosial

Pelayanan terhadap hak-hak dasar masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah sekaligus akan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, utamanya dibidang spiritual. Pembangunan spiritual sangat wigen dalam kerangka mengantisipasi permasalahan sosial yang rentang terjadi di mana-mana dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari kondisi sarana peribadatan masing-masing agama. Dalam tahun 2004, tempat peribadatan umat beragama Islam di Kabupaten Selayar berupa mesjid dan musallah, masing-masing berjumlah 300 buah dan 32 buah. Sedang tempat peribadatan bagi umat Kristen berupa gereja 1 buah.

Sarana peribadatan umat beragama Islam ini, juga digunakan sebagai tempat pembelajaran baca Al Qur'an, sehingga para remaja atau peserta didik pembelajaran baca Al Qur'an memperoleh kemudahan untuk memilih tempat belajar.

Pembangunan spiritual di Kabupaten Selayar didukung dengan rohaniawan sebanyak 2 (dua) orang ulama, 425 orang muballiq, 425 khatib serta 85 orang penyuluh agama. Selain itu, sebagai wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Selayar juga terdapat sejumlah kelompok pengajian, majelis ta'lim dan grup kasidah. Kesemuanya itu diharapkan mampu berperan dengan baik dalam pembangunan bidang spiritual.

2.4. Prasarana dan Sarana Daerah

Sampai dengan tahun 2006 ini, sarana dan prasarana yang ada, dapat dirinci ke dalam 4 (empat) sektor, yaitu : (a) Transportasi; (b) Pendidikan; (c) Kesehatan; dan (d) Perikanan dan Kelautan.

a. Transportasi

Transportasi berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan dan pemersatu wilayah. Infrastruktur transportasi di Kabupaten Selayar mencakup transportasi jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut, dan udara. Pada umumnya infrastruktur tersebut mengemban fungsi pelayanan publik dan misi pembangunan daerah serta mendukung kemajuan pembangunan secara nasional.

Sampai akhir tahun 2005 di Kabupaten Selayar terdapat panjang jalan **789,99 km** yang terdiri dari **100,5 km** Jalan Propinsi dan **689,49 km** Jalan Kabupaten, dengan kondisi Jalan Propinsi : Baik **4,55 km**, Sedang **11,45 km**, Rusak Ringan **59,73 km** dan Rusak Berat **25,77 km**; sedangkan Jalan

Kabupaten dengan Kondisi Baik **197 km**, Sedang **155,07 km**, Rusak Ringan **216,57 km** dan Rusak Berat **102,85 km**.

Sistem transportasi Regional Kab. Selayar mempunyai posisi yang sangat strategis karena dilalui oleh jalur transportasi antara dua propinsi yaitu Sulawesi Selatan (Sul-Sel) dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dermaga Feri Pamatata – Benteng – Dermaga Feri Pattumbukang yang panjangnya **100,5 km**. Kondisi permukaan ruas jalan ini sangat memprihatinkan karena sejak ± 15 tahun terakhir belum pernah ditingkatkan, selama ini hanya ditangani dengan pemeliharaan rutin sehingga kondisinya semakin menurun, akibatnya mobilitas penduduk termasuk lalu lintas angkutan barang dan jasa sangat terganggu dan memperlambat waktu tiba di tujuan serta mempertinggi biaya operasi kendaraan.

Disamping daripada itu terdapat beberapa ruas jalan lingkar di Pantai Timur Pulau Selayar yang beberapa tahun yang lalu sudah dibuka dengan dana APBD II, namun karena keterbatasan kemampuan dana sehingga jalan tersebut tidak dilanjutkan pembangunannya.

Dalam hal transportasi penyeberangan baik antar pulau maupun antar kabupaten dan propinsi juga terdapat beberapa permasalahan mendasar. Ketersediaan fery, sebagai alat angkut utama penyeberangan dari pamatata – bira belum memungkinkan untuk mendukung laju mobilitas barang dan jasa serta penumpang saat ini angkutan penyeberangan berupa fery baru tersedia 1 (satu) unit. Sementara tuntutan akan ketersediaan fery untuk melayani transportasi penyeberangan baik jalur Pamatata – Bira maupun jalur antar pulau dalam wilayah kabupaten Selayar diperkirakan sebanyak 8 (delapan) unit dengan rincian : 3 (tiga) unit fery untuk melayani penyeberangan Pamatata – Bira, dan sisanya sebanyak 5 (lima) unit diperuntukkan untuk melayani kebutuhan penyeberangan antar pulau dan antar kecamatan di wilayah kepulauan Selayar.

Selanjutnya untuk lebih mengembangkan Selayar sebagai kabupaten maritim yang terdepan, maka dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk kepentingan pembangunan daerah menuntut perlunya menata dan merestrukturisasi sistim transportasi laut daerah untuk melibatkan diri dalam jaringan transportasi laut

nasional. Dalam kaitan itu, masih terpuruknya peran armada pelayanan nasional dalam mengangkut muatan dapat mempengaruhi semangat dan keinginan daerah untuk memanfaatkan pengintegrasian sistim transportasi daerah kedalam sistim transportasi nasional.

b. Pendidikan

Pendidikan dalam arti sempit adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan untuk mengembangkan peranan di masa depan. Amanat pembangunan pendidikan adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat baik wilayah daratan maupun wilayah kepulauan.

Dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia, sektor pendidikan di Kabupaten Selayar hingga saat ini, masih terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pendidikan, terutama pengadaan fasilitas penunjang proses belajar mengajar (buku, komputer, dan fasilitas lainnya); dan pengadaan asrama siswa di wilayah kepulauan. Disamping itu, kondisi perumahan bagi guru dan bujang sekolah juga masih memerlukan perhatian yang serius guna meningkatkan motivasi dan kegairahan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku pendidik.

c. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar terwujud derajat kesejahteraan secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, menuntut adanya kemampuan daerah dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan, termasuk kemampuan SDM bidang kesehatan secara memadai

Pembangunan bidang kesehatan di kababupaten selayar dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang membutuhkan penanganan dan solusi secepatnya yang meliputi sarana dan prasarana tenaga medis dan paramedis, kemampuan manajemen pengelola pelayanan kesehatan, pendanaan dan partisipasi masyarakat bidang kesehatan.

Kondisi sarana dan prasarana kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas belum memadai. sampai dengan tahun 2005, Rumah sakit yang ada baru 1 (satu) buah, puskesmas sebanyak 9 (sembilan) buah, dan posyandu 183 (seratus delapan puluh tiga) buah, pustu sebanyak 42 (empat puluh dua) buah, puskel sebanyak 11 (sebelas) buah. Dengan membandingkan besaran jumlah penduduk dan kesehatan wilayah terutama untuk daerah kepulauan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana disebutkan di atas belum memadai.

Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan sebanyak 227 orang yang terdiri dari; 11 (sebelas) orang dokter umum, 2 (dua) orang dokter gigi, sisanya sebanyak 218 orang tenaga paramedis termasuk perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya.

d. Perikanan dan Kelautan

Perikanan dan Kelautan merupakan sektor penting dan utama dalam upaya mewujudkan Selayar sebagai kabupaten Maritim . Terdepan dan Mapan Mandiri yang Berkelanjutan. Kemajuan sektor Perikanan dan Kelautan dipandang agar turut mempercepat kemajuan sektor-sektor lain melalui peranannya sebagai titik tumpu perekonomian daerah serta sebagai sumber penerimaan daerah yang dominan.

Pembangunan sektor Perikanan Kelautan Kabupaten Selayar juga mengalami kendala dengan adanya keterbatasan infrastruktur Perikanan dan Kelautan, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) naik yang berskala daerah maupun yang berskala regional belum ada. Sementara kebutuhan akan ketersediaan fasilitas tersebut sudah semakin mendesak, kecuali karena semakin baiknya sehubungan negosiasi dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, maka sejak tahun 2004 telah dibangun fasilitas Pelabuhan Pendaratan Ikan yang berskala nasional dengan dukungan pendanaan dari pusat, saat ini pembangunannya sudah sampe Tahap II. Diharapkan dukungan ini akan dapat meningkatkan geliat pembangunan sektor Perikanan dan Kelautan di kabupaten Selayar.

Disamping fasilitas infrastruktur, fasilitas lainnya yang dianggap penting dan hingga saat ini belum tersedia di daerah atau bursa komoditas Perikanan dalam

rangka meningkatkan akses bagi masyarakat mengenai informasi harga pasar potensial bagi komoditas perikanan.

Beberapa permasalahan pokok berkaitan dengan pembangunan bidang infrastruktur berkaitan dengan pengembangan wilayah kepulauan adalah (1) belum terbangunnya jaringan jalan antar desa/dusun ; (2) belum terbangunannya pelabuhan laut yang representatif pada lokasi-lokasi strategis ; (3) belum tersedianya armada perintis lokal yang mampu melayani kebutuhan transportasi laut reguler baik antar pulau di wilayah kepulauan maupun antara wilayah kepulauan dengan daratan Selayar ; (4) belum terbangunannya sarana dan prasarana air bersih ; (5) belum tersedianya jaringan irigasi teknis pada daerah pengembangan tanaman pangan di Pulau Jampea ; (6) belum tersedia sarana dan prasarana pelayanan pos dan telekomunikasi yang memadai.

Pemerintahan Umum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah mengubah paradigma pemerintahan dari sistem sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut memberi kewenangan dan kesempatan yang lebih luas dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumberdaya yang dimilikinya. Hal ini merupakan peluang bagi daerah untuk mengembangkan pembangunan dengan memanfaatkan segala sumberdaya yang ada sesuai kebutuhan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, juga merupakan tantangan bagi daerah untuk mengantisipasi segala kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang bermuarah pada peningkatan daya saing organisasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga memberi penegasan antara fungsi Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga eksekutif dan DPRD yang merupakan lembaga legislatif daerah.

Kejelasan fungsi kedua lembaga yang dimaksud sangat bermanfaat bagi proses demokratisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga

chek dan balances dapat dapat ditetapkan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu pemerintahan yang adil, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pemerintahan Kabupaten Selayar, saat ini didukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 2.856 orang. Diantaranya yang dominan atau tertinggi jumlahnya adalah komponen guru (tenaga pendidik) yaitu 1593 orang atau 61,26 %.

Diamping kuantitas aparatur pemuda yang relatif kecil dibanding tugas-tugas yang harus diselenggarakan juga kualitasnya belum memadai. Karena itu peningkatan mutu aparatur pemda kedepan perlu mendapat perhatian khusus agar kelak mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Kemajuan dan produktivitas suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumberdaya manusia yang merupakan penggerak roda organisasi dalam arti memanfaatkan segala sumberdaya dan aspek pendukung organisasi tersebut.

Dilihat dari aspek kuantitas, jumlah sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Selayar masih tergolong relatif kecil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Demikian pula halnya dengan kualitas yang belum memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari kualifikasi pendidikan yang belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kompetensi untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing.

Kondisi tersebut berdampak pada distribusi pada sumberdaya aparatur yang belum dapat dilaksanakan berdasarkan hasil analisis jenis dan beban kerja. Akibatnya belum sepenuhnya penempatan dalam jabatan bagi PNS disesuaikan antara kualifikasi pendidikan / kompetensi PNS dengan jabatan dan tugas organisasi yang dilaksanakan.

Permasalahan ini perlu diantisipasi melalui upaya peningkatan kualifikasi pendidikan formal aparatur dan pendidikan dan pelatihan teknis / fungsional sesuai bidang tugasnya masing-masing serta rekrutmen pegawai sesuai formasi kebutuhan organisasi yang tersebar diberbagai unit kerja.

BAB III

VISI DAN MISI

3.1. Visi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan perjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Dengan demikian dirumuskan Visi pembangunan untuk lima tahun ke depan, yaitu “Dengan Pemerintahan yang Amanah, Efektif dan Efisien kita wujudkan Selayar sebagai Kabupaten Maritim”

3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pemerintah Daerah telah membangun komitmen yang dituangkan dalam misi ;

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM aparatur pemerintah dan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Potensi Kelautan
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Potensi Pertanian, Perdagangan dan Industri
5. Meningkatkan Infra Struktur Dasar Masyarakat
6. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka sasaran pembangunan dalam lima tahun ke depan, adalah :

1. Pemulihan Ekonomi, baik sektor formal maupun sektor informal dengan pertumbuhan rata-rata 5% pertahun.
2. Peningkatan Pendapatan Perkapita masyarakat menjadi 5 juta rupiah pada tahun 2010.

3. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi 10 milyar pada tahun 2010.
4. Kesiapan segenap aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Pemberdayaan masyarakat dalam melakukan “*social Control*” untuk mewujudkan aparatur yang bersih, transparan, bertaqwa dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
6. Mengembangkan, memberdayakan dan memandirikan UMKM sebagai pelaku ekonomi strategis, yang merupakan urat nadi sistem ekonomi kerakyatan yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah, penyerap tenaga kerja terbanyak dan merupakan pelaku ekonomi yang cukup tangguh menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi pembangunan Selayar tersebut diatas ditempuh melalui **3 (tiga) Strategi Pokok Pembangunan**, yaitu :

1. Membangun kerjasama antar daerah dalam rangka memperkuat integritas kabupaten Selayar.
2. Optimalisasi kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat dalam kerangka terwujudnya pemerintahan yang baik.
3. Menempatkan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pertanian dan pariwisata sebagai motor penggerak dalam pembangunan di Kabupaten Selayar.

Strategi pembangunan pertama, dimaksudkan untuk membangun pengakuan dari berbagai pihak, memiliki kemampuan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah lain diberbagai bidang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi motivasi bagi seluruh komponen masyarakat secara internal untuk secara bersama-sama menyumbangkan segala kemampuannya dalam membangun daerah.

Strategi pembangunan kedua, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintahan daerah mulai tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa/kelurahan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang kuat, efektif, efisien, akomodatif, responsif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kemampuan kelembagaan ini akan diwujudkan melalui penataan struktur, tugas pokok dan fungsi organisasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur, pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, serta penyediaan sarana dan prasarana kerja.

Peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima harus pula dibarengi oleh peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat secara seimbang sehingga tercipta sinergitas dalam menyikapi berbagai permasalahan pembangunan di daerah.

Strategi pembangunan ketiga, diarahkan pada pembangunan perekonomian daerah secara komprehensif dengan bertumpu dan mengandalkan sektor kelautan dan perikanan serta pertanian dan pariwisata sebagai motor penggerak sektor-sektor lainnya. Strategi ini memberikan penekanan bahwa untuk memajukan Selayar di masa depan, maka titik berat pembangunan harus diarahkan pada pembangunan prasarana dan sarana dasar kemaritiman, pertanian dan pariwisata serta sarana penunjang lainnya dengan berdasar kepada pembangunan terpadu dengan membangun kawasan-kawasan andalan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan materi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka landasan hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Azas Umum dan Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kerugian Daerah dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Keuangan Daerah dikelola secara ***tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.***

- Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib yaitu keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

- Pengelolaan keuangan dilakukan dengan taat pada peraturan perundang-undangan yaitu bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan peundang-undangan
- Pengelolaan keuangan secara efektif adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil
- Pengelolaan keuangan secara efisien adalah merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu
- Pengelolaan keuangan secara ekonomis adalah merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah
- Pengelolaan keuangan secara transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
- Pengelolaan keuangan secara bertanggungjawab adalah merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
- Pengelolaan keuangan harus memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yaitu keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif, kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional dan manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

Dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum telah dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan

akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah khususnya.

Misi utama dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, melainkan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong munculnya partisipasi masyarakat.

5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan sumber-sumber Pendapatan Daerah berdasarkan hak dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta dengan mencermati perkembangan perekonomian saat ini maka kebijakan anggaran pendapatan daerah lebih ditekankan pada upaya mengefektifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial khususnya Pendapatan Asli Daerah **secara hati-hati dan bijaksana** sehingga tidak menghambat kemajuan dunia usaha dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 berpijak pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan tetap mempertimbangkan kewenangan dan faktor-faktor riil yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sejalan dengan itu Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan sebagai tolok ukur kinerja sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah
- b. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan pendapatan daerah

Hal ini dimaksudkan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah diharapkan tidak memberatkan beban masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi perekonomian daerah pada khususnya maupun regional dan nasional pada umumnya.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah tersebut diatas, dapat dijabarkan secara operasional sebagai berikut :

- Mencermati potensi obyek sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 sebagai Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Kewenangan Daerah
- Ekstensifikasi dan intensifikasi dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana sehingga tidak menimbulkan kontra produktif yang akan menurunkan aktifitas perekonomian daerah yang pada gilirannya menurunkan pendapatan perkapita serta kesejahteraan masyarakat
- Memperluas jangkauan dan menambah jenis pelayanan publik serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pelayanan yang terkait dengan pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan lainnya
- Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah yang terkait dengan pendapatan daerah
- Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik tingkat yang lebih tinggi maupun di daerah dalam rangka mengoptimalkan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak serta Bantuan Keuangan
- Mengupayakan penarikan dana pembangunan secara optimal dari pemerintah yang lebih tinggi khususnya dari Dana Alokasi Khusus
- Meningkatkan kemampuan aparat pengelola pendapatan daerah dengan mengikuti pendidikan, kursus-kursus singkat atau pelatihan teknis yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
- Mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk menghindari terjadinya kebocoran

5.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka memdanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 secara umum diarahkan untuk membiayai ***Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung***. Belanja Tidak Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sedangkan Belanja Langsung adalah merupakan Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Kebijakan Umum Belanja Tidak Langsung

Kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Kebijakan Umum Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2007 ditetapkan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai :

Merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS serta Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan

dan penerimaan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS melalui peningkatan gaji pada tahun 2007, maka penyediaan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai disesuaikan dengan petunjuk dan kebijakan Pemerintah dan juga disediakan anggaran untuk pembayaran gaji ke 13 Tahun Anggaran 2007 serta anggaran untuk CPNS Tahun Anggaran 2006.

Selain itu Pemerintah daerah juga memberikan tambahan penghasilan kepada PNS dalam bentuk Tunjangan hari raya, Tunjangan bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara barang serta tunjangan daerah terpencil.

b. Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Untuk tahun anggaran 2007 dianggarkan untuk pembayaran bunga atas pinjaman kepada Bank Sul Sel dan Lembaga Keuangan lainnya.

c. Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain itu juga diberikan bantuan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang berasal dari Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Untuk tahun

anggaran 2007 beberapa penerimaan daerah dibagi hasilkan kepada Desa yaitu Pajak Pengambilan Bahan Tambang Galian Gol C, Retribusi IMB, dan PBB serta BPHTB.

e. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Kelurahan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Untuk tahun anggaran 2007 Desa mendapatkan alokasi Dana Perimbangan sebesar 10 % dari penerimaan DAU tahun anggaran 2007 serta Kelurahan mendapatkan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

2. Kebijakan Umum Belanja Langsung

Kelompok Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai dan manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Sedangkan belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

5.3 Kebijakan Umum Anggaran

Dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum telah dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah khususnya.

Misi utama dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, melainkan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong munculnya partisipasi masyarakat.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN UMUM

Agar perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan lebih terarah dan realistis, maka dirumuskan arah kebijakan umum pembangunan setiap bidang sebagai berikut :

6.1. Bidang Pendidikan

Arah kebijakan umum bidang pendidikan diarahkan pada upaya mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, melalui penataan dan peningkatan peran lembaga pendidikan sebagai salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia disamping tentunya dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, serta pemahaman nilai – nilai budaya.

6.2. Bidang Kesehatan

Isu bidang kesehatan berhimpit erat dengan isu bidang pendidikan yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, arah kebijakan umum bidang kesehatan diarahkan pada Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk, melalui penekanan pada penurunan ratio Angka Kematian Bayi dan Ibu melahirkan, Peningkatan Usia Harapan Hidup. Kebijakan tersebut dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Paradigma Indonesia Sehat 2010.

6.3. Bidang Pekerjaan Umum

Arah Kebijakan Umum Bidang Pekerjaan Umum diarahkan pada Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi dan Air Minum, serta Pengelolaan Sanitasi Lingkungan. Arah Kebijakan Umum ini dimaksudkan guna tercapainya efektifitas dan efisiensi, dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian dan kehidupan sosial yang lebih baik.

6.4. Bidang Perumahan Rakyat

Arah Kebijakan Umum Bidang Perumahan Rakyat diarahkan pada Fasilitasi ketersediaan rumah murah bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Guna

mewujudkan kebijakan ini maka pemberian insentif kepada pengembang mutlak diperlukan disamping perlunya adanya regulasi – regulasi yang dipandang dapat menarik minat bagi pengembang.

6.5. Bidang Penataan Ruang

Arah Kebijakan Umum Bidang Penataan Ruang diarahkan untuk Memperkuat struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Selayar. Arah kebijakan umum ini dimaksudkan sebagai upaya mengintegrasikan wilayah Kabupaten Selayar dengan Kabupaten/Kota pada kawasan-kawasan pengembangan, baik di Kabupaten/Kota dalam jazirah Sulawesi Selatan maupun Kabupaten/Kota pada propinsi-propinsi yang berbatasan dengan Kabupaten Selayar dengan harapan akan mendorong dan memicu tumbuhnya investasi pada kawasan-kawasan pengembangan utamanya di bidang perdagangan dan pariwisata.

6.6. Bidang Perencanaan Pembangunan

Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berorientasi pada prinsip partisipatif.

Arah kebijaksanaan ini dimaksudkan agar perencanaan yang disusun dibangun dan dirumuskan melalui pendekatan partisipatif sehingga masyarakat dapat lebih memegang peranan dalam proses pelaksanaannya.

6.7. Bidang Perhubungan

Arah Kebijakan Umum Bidang Perhubungan diarahkan pada Optimalisasi Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perhubungan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan khususnya di wilayah kepulauan yang masih sangat minim. Karena itu, dengan kebijakan ini diharapkan mobilitas barang dan jasa dapat lebih meningkat yang pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

6.8. Bidang Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan Umum yang ingin dicapai pada bidang Lingkungan Hidup adalah Menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Keseimbangan tersebut berarti menjamin keberlanjutan pembangunan. Untuk itu

pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor menjadi suatu keharusan.

6.9. Bidang Pertanahan

Arah Kebijakan Umum Bidang Pertanahan dititikberatkan pada Peningkatan Pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan. Pembangunan bidang pertanahan ini dimaksudkan sebagai upaya pelayanan pertanahan, utamanya terhadap penyelesaian sengketa tanah, pemanfaatan tanah secara optimal, serta perencanaan tata ruang dan tata guna tanah, termasuk penataan atas penggunaan, penguasaan, pemilikan dan hak atas tanah.

6.10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Arah Kebijakan Umum Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan pada Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mendukung perencanaan pembangunan. Arah kebijakan Umum tersebut dimaksudkan sebagai kebijakan penataan administrasi kependudukan guna mendorong peningkatan kualitas dokumen, data dan informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik.

6.11. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Arah Kebijakan Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan diprioritaskan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup, Peran dan Kedudukan Perempuan di berbagai bidang pembangunan. Hal ini dimaksudkan selain sebagai tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender, juga dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup perempuan.

6.12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Arah Kebijakan Umum Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk Mengendalikan pertumbuhan Penduduk serta Meningkatkan Keluarga Kecil yang Berkualitas. Dengan demikian fokus utama kebijakan ini adalah terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil yang berkualitas yang ditandai dengan; menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya peserta KB aktif, meningkatnya metode kontrasepsi yang efektif serta efisien.

6.13. Bidang Sosial

Arah Kebijakan Umum Bidang Sosial diarahkan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sosial. Arah Kebijakan Umum ini dimaknai sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan sosial masyarakat seperti; penyediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan secara merata dan berkualitas, peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar dan jangkauan kesehatan, pembinaan keagamaan serta jaminan perlindungan terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya fakir miskin dan anak terlantar.

6.14. Bidang Tenaga Kerja

Arah Kebijakan Umum Bidang Tenaga Kerja adalah Menciptakan Perluasan dan Kesempatan Kerja. Arah Kebijakan Umum ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja produktif serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur baik di perdesaan maupun dipertanian.

6.15. Bidang Koperasi dan UKM

Arah Kebijakan Umum Bidang Koperasi dan UKM difokuskan pada Pemberdayaan Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Arah Kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya me-reposisi peran strategis Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Masyarakat. Sementara upaya pengembangan UKM diarahkan untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing.

6.16. Penanaman Modal

Pembangunan bidang penanaman modal dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk mendorong laju peningkatan investasi pada sektor swasta sehingga tercipta lapangan kerja baru yang dapat diakses oleh tenaga kerja lokal melalui penciptaan suasana yang aman dan kondusif.

Hal tersebut selain dimaksudkan agar sektor swasta lebih mengembangkan perannya dalam membangun perekonomian daerah, juga diharapkan melalui investasi, terjadi difusi baik dalam hal teknologi (*transfer of technology*) maupun keterampilan (*transfer of skill*).

6.17. Kebudayaan

Pembangunan Bidang Kebudayaan diarahkan pada upaya menggali dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung kemodernan sehingga mampu memberikan stimulus bagi percepatan perubahan pola pikir dan pola tingkah laku masyarakat.

Arah kebijakan ini dimaksudkan agar tatanan yang telah ada dan mengakar kuat di masyarakat dapat dipertahankan tanpa harus menumbuhkan anti pati terhadap pengaruh globalisasi dan perubahan yang terjadi secara revolusioner. Disamping itu, juga dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat agar tidak *shock* dalam menghadapi proses transformasi sosial.

6.18. Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan bidang Pemuda dan Olah Raga diarahkan pada upaya membangun kreatifitas pemuda dan mendorong peningkatan prestasi olah raga agar mampu bersaing dan atau sejajar dengan daerah-daerah lain.

Arah kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada pemuda mengembangkan perannya sesuai kreatifitasnya dan meningkatkan mutu keolahragaan agar dapat bersaing dan berprestasi dalam event –event olah raga baik pada tingkat regional, maupun nasional.

6.19. Kesbang dan Politik Dalam Negeri

Pembangunan Bidang Kesbang diarahkan pada upaya meningkatkan integrasi sosial di kalangan masyarakat sehingga semangat kebangsaan di kalangan masyarakat dapat lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan. Sedangkan pembangunan bidang politik dalam negeri diarahkan pada upaya melindungi masyarakat dari pengaruh negatif globalisasi dan kemajuan zaman agar tatanan dan nilai-nilai yang ada dapat tetap dipertahankan.

Arah kebijakan Pembangunan Bidang Kesbang sebagaimana disebutkan di atas dimaksudkan agar suasana konflik dan perpecahan yang sewaktu-waktu dapat mengancam tatanan masyarakat dapat dihindari sehingga menjamin kehidupan sosial dan ekonomi berjalan dengan baik. Demikian pula halnya dengan

arah kebijaksanaan pembangunan bidang politik dalam negeri dimaksudkan agar sikap konsumeristik dan nilai kebarat-baratan dapat dihindari dan sebaliknya nilai-nilai ketimuran dapat tetap bertahan dan menjadi karakteristik masyarakat.

6.20. Pemerintahan Umum

Pembangunan bidang pemerintahan umum diarahkan pada mewujudkan empat tertib dan empat sukses. Empat tertib terdiri dari : (a) tertib administrasi administrasi Kepegawaian; (b) tertib administrasi keuangan; (c) tertib administrasi perlengkapan; (d) tertib pelayanan peraturan dan perundang-undangan; dan empat sukses yaitu : (a) sukses pelayanan masyarakat/publik; (b) sukses pelayanan pendapatan daerah; (c) sukses pelayanan pengawasan; (d) sukses pelayanan pembangunan.

6.21. Kepegawaian

Pembangunan Bidang Kepegawaian diarahkan pada upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian agar dapat memberikan rangsangan bagi aparatur pemerintah daerah sebagai pegawai negeri sipil dalam meningkatkan kinerja dan prestasinya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berdampak pada perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

6.22. Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada upaya peningkatan kemandirian masyarakat dan desa untuk mampu mengatasi dan menyelesaikan sendiri permasalahan yang ada di lingkungan masing-masing serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan.

Bidang Statistik

Pembangunan bidang statistik diarahkan pada upaya mengembangkan sistem statistik melalui dukungan data base yang handal, akuntabel, dan up to date, sehingga mampu menyediakan data sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Arah kebijakan ini dimaksudkan agar segenap stakeholders baik yang ada di daerah maupun yang ada diluar daerah dapat mengakses data statistik secara cepat dan tepat terkait dengan kepentingan masing-masing.

Bidang Kearsipan

Pembangunan bidang kearsipan diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas sistem kearsipan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dokumen daerah dan pelayanan informasi, sehingga kemanfaatannya dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Komunikasi dan Informatika

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika diarahkan pada mengembangkan komunikasi, informasi dan media massa, yang bersinergi dengan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi daerah sehingga mendukung dan atau memiliki saling keterkaitan dengan sistem komunikasi dan informasi nasional.

Bidang Pertanian

Pembangunan bidang pertanian diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi melalui penerapan teknologi tepat guna, serta menjamin ketahanan pangan daerah.

Bidang Kehutanan

Pembangunan bidang kehutanan diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara lestari, melalui pelibatan masyarakat dalam aspek pengelolaan dan pengawasan.

Bidang Energi dan sumberdaya Mineral

Pembangunan bidang energi dan sumberdaya mineral diarahkan pada upaya meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, serta pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

Bidang Pariwisata

Pembangunan bidang pariwisata diarahkan pada upaya pengembangan pemasaran, destinasi, dan kemitraan pariwisata daerah serta penyiapan sarana prasarana kepariwisataan.

Bidang Kelautan dan perikanan

Pembangunan bidang kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk dalam aspek pengawasan dan pengendalian, meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut, serta peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan dan kelautan.

Bidang Perdagangan

Pembangunan bidang perdagangan diarahkan pada upaya meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, meningkatkan kerjasama perdagangan antardaerah, dan pembinaan pedagang kaki lima,

Bidang Perindustrian

Pembangunan bidang perindustrian diarahkan pada upaya meningkatkan kapasitas iptek dan sistem produksi, mengembangkan industri kecil dan menengah, meningkatkan kemampuan teknologi industri, dan menata kembali struktur industri yang ada di daerah, serta mengembangkan sentra-sentra industri potensial

Bidang Transmigrasi

Pembangunan bidang transmigrasi diarahkan pada upaya mengembangkan wilayah transmigrasi, dan melaksanakan transmigrasi lokal untuk mempercepat terjadinya peningkatan pemanfaatan lahan secara efektif dan efisien.

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan rumusan kebijakan RPJPD Kabupaten Selayar Tahun 2006-2025 dan mengacu pada visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka dirumuskan agenda program dan sasaran pembangunan Kabupaten Selayar Tahun 2006-2010 yang akan diuraikan sebagaimana berikut ini. Program Pembangunan ini bersifat indikatif untuk dijadikan acuan penyusunan dokumen perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Restra SKPD). Penyusunan Restra dimaksud disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, baik APBD Kabupaten Selayar, maupun APBD Propinsi Sulawesi Selatan, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

7.1 Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan :

- a. Program pendidikan anak usia dini
- b. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
- c. Program pendidikan menengah
- d. Program pendidikan nonformal
- e. Program pendidikan luar biasa
- f. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- g. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- h. Program manajemen pelayanan pendidikan

7.2 Bidang kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program obat dan perbekalan kesehatan
- b. Program upaya kesehatan masyarakat
- c. Program pengawasan obat dan makanan
- d. Program pengembangan obat asli Indonesia
- e. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- f. Program perbaikan gizi masyarakat

- g. Program pengembangan lingkungan sehat
- h. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- i. Program standarisasi pelayanan kesehatan
- j. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- k. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya
- l. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
- m. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
- n. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- o. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- p. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
- q. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- r. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

7.3 Bidang Pekerjaan Umum

Pembangunan bidang pekerjaan umum dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pembangunan jalan dan jembatan
- b. Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
- c. Program pembangunan turap / talud / bronjong
- d. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
- e. Program rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong
- f. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
- g. Program tanggap darurat jalan dan jembatan
- h. Program pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan
- i. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- j. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- k. Program penyediaan dan pengelolaan air baku

- l. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- m. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- n. Program pengendalian banjir
- o. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- p. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

7.4 Bidang Perumahan Rakyat

Pembangunan bidang perumahan rakyat dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pengembangan perumahan
- b. Program lingkungan sehat perumahan
- c. Program pemberdayaan komunitas perumahan
- d. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
- e. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- f. Program pengelolaan areal pemakaman

7.5 Bidang Penataan Ruang

Pembangunan bidang penataan ruang dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program perencanaan tata ruang
- b. Program pemanfaatan ruang
- c. Program pengendalian pemanfaatan ruang

7.6 Bidang Perencanaan Pembangunan

Pembangunan bidang perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pengembangan data / informasi
- b. Program kerjasama pembangunan
- c. Program pengembangan wilayah perbatasan
- d. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- e. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

- f. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- g. Program perencanaan pembangunan daerah
- h. Program perencanaan pembangunan ekonomi
- i. Program perencanaan sosial budaya
- j. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- k. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

7.7 Bidang Perhubungan

Pembangunan bidang perhubungan dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- b. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- c. Program peningkatan pelayanan angkutan
- d. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- e. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- f. Program peningkatan kalaikan pengoperasian kendaraan bermotor

7.8 Bidang Lingkungan Hidup

Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- b. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- d. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
- e. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- f. Program peningkatan pengendalian polusi
- g. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
- h. Program pengendalian kebakaran hutan
- i. Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
- j. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

7.9 Bidang Pertanahan

Pembangunan bidang pertanahan dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
- b. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- c. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- d. Program pengembangan sistem informasi pertanahan

7.10 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program penataan administrasi kependudukan

7.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

7.12 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program keluarga berencana
- b. Program kesehatan reproduksi remaja
- c. Program pelayanan kontrasepsi
- d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri
- e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat
- f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

- g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS
- h. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- i. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
- j. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

7.13 Bidang Sosial

Pembangunan bidang sosial dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
- b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- c. Program pembinaan anak terlantar
- d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- e. Program pembinaan panti asuhan / panti jompo
- f. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

7.14 Bidang Tenaga Kerja

Pembangunan bidang tenaga kerja dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- b. Program peningkatan kesempatan kerja
- c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

7.15 Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif
- b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- c. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
- d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

7.16 Penanaman Modal

Pembangunan penanaman modal dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- c. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

7.17 Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pengembangan nilai budaya
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya
- c. Program pengelolaan keragaman budaya
- d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

7.18 Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan Pemuda dan olah raga dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
- b. Program peningkatan peran serta kepemudaan
- c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- d. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- e. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
- f. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- g. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga

7.19 Kesbang dan Politik Dalam Negeri

Pembangunan kesbang dan politik luar negeri dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- c. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- e. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

- f. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- g. Program pendidikan politik masyarakat
- h. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

7.20 Pemerintahan Umum

Pembangunan pemerintahan umum dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
- c. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota
- e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- g. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- h. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- i. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- j. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- k. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
- l. Program penataan peraturan perundang-undangan
- m. Program penataan daerah otonomi baru

7.21 Kepegawaian

Pembangunan kepegawaian dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pendidikan kedinasan
- b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- c. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

7.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
- b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- e. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan

7.23 Bidang Statistik

Pembangunan statistik dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pengembangan data / informasi / statistik daerah

7.24 Bidang Kearsipan

Pembangunan kearsipan dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

7.25 Komunikasi dan Informatika

Pembangunan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
- b. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
- c. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- d. Program kerjasama informasi dengan mas media

7.26 Bidang Pertanian

Pembangunan bidang pertanian dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program peningkatan kesejahteraan petani
- b. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
- c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- d. Program peningkatan pererapan teknologi pertanian / perkebunan
- e. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan
- f. Program perberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan
- g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- h. Program peningkatan produksi hasil peternakan

- i. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- j. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

7.27 Bidang Kehutanan

Pembangunan bidang kehutanan dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
- b. Program rehabilitasi hutan dan lahan
- c. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- d. Program pemanfaatan kawasan hutan industri
- e. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
- f. Program perencanaan dan pengembangan hutan

7.28 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- b. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
- c. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

7.29 Bidang Pariwisata

Pembangunan bidang pariwisata dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pengembangan pemasaran pariwisata
- b. Program pengembangan destinasi pariwisata
- c. Program pengembangan kemitraan

7.30 Bidang Kelautan dan Perikanan

Pembangunan bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
- c. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
- d. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

- e. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
- f. Program pengembangan budidaya perikanan
- g. Program pengembangan perikanan tangkap
- h. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
- i. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- j. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

7.31 Bidang Perdagangan

Pembangunan bidang perdagangan dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- b. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional
- c. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
- d. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- e. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

7.32 Bidang Perindustrian

Pembangunan bidang perindustrian dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
- b. Program pengembangan industri kecil dan menengah
- c. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- d. Program penataan struktur industri
- e. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

7.33 Bidang Transmigrasi

Pembangunan bidang transmigrasi dilaksanakan melalui berbagai program :

- a. Program pengembangan wilayah transmigrasi
- b. Program transmigrasi lokal
- c. Program transmigrasi regional

BAB VIII

PENUTUP

RPJMD Kabupaten Selayar Tahun 2006 – 2010 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

RPJMD Kabupaten Selayar Tahun 2006 – 2010 menjadi pedoman bagi badan, dinas dan kantor dalam menyusun rencana strategis (renstra) badan, dinas dan kantor. Selain itu, RPJMD Tahun 2006 – 2010 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD hingga tahun 2010.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Badan, dinas dan kantor, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPKMD Tahun 2006 – 2010 dengan sebaik-baiknya;
2. Badan, dinas dan kantor berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi badan, dinas dan kantor yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2006 – 2010 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun renstra badan, dinas dan kantor;
3. Badan/dinas/kantor berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 – 2010 dengan Rencana Strategis Badan, Dinas dan Kantor;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaannya, BAPPEDA Kabupaten Selayar berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran ke dalam rencana strategis badan, dinas dan kantor

Benteng, 5 Januari 2006

BUPATI SELAYAR

H. SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN-LAMPIRAN